

PERCOBAAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor Perkara:76/PID/2015/PT.MDN dan
Putusan Nomor Perkara: 145/Pid.B/2016/PT.PBR)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

YUSUF KHOIRUL HUDA

C100150210

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA PERCOBAAN KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Nomor Perkara: 76/PID/2015/PT.MDN dan

Putusan Nomor Perkara: 145/Pid.B/2016/PT.PBR)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

YUSUF KHOIRUL HUDA

C100150210

Telah di periksa dann disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

(Kuswardani, S.H., M.Hum.)

HALAMANA PENGESAHAN

PERCOBAAN KEKERASAN SEKSUAL

**(Studi Putusan Nomor Perkara:76/PID/2015/PT.MDN dan
Putusan Nomor Perkara: 145/Pid.B/2016/PT.PBR)**

OLEH

YUSUF KHOIRUL HUDA

C100150210

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 14 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Kuswardani, S.H.,M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Muchammad Iksan, S.H.,M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Hartanto, S.H.,M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)**

()
()
()

Dekan,



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Februari 2020

Penulis



YUSUF KHOIRUL HUDA

C100150210

PERCOBAAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor Perkara:76/PID/2015/PT.MDN dan
Putusan Nomor Perkara: 145/Pid.B/2016/PT.PBR)

Abstrak

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada umumnya kata percobaan atau poding berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 ayat (1) KUHP. Adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut :Pasal 53 ayat (1);Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Merujuk pada Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, menyatakan: “Kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki”.

Kata Kunci: tindak pidana, percobaan, kekerasan seksual.

Abstract

Crime is a translation of the “*strafbaar feit*” act that is prohibited by a prohibited law where there is a threat (sanction) in the form of a specific sentence, for those who violate the prohibition. In general, the word trial or poding means efforts to achieve a goal, which in the end is not or has not been achieved. Efforts to commit crimes are regulated in Book I of General Regulations, Chapter IV Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code. The article's voice is as follows: Article 53 paragraph (1): Trying to commit a crime is criminalized, if the intention to do so has been proven from the commencement of the implementation, and the completion of the implementation, not solely because of his own free will. Sexual violence is an act that leads to sexual solicitation without consent. This also includes sexual acts against children committed by adults. Referring to General Recommendation No. 19 of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW Committee) on Violence Against Women, stated: “Gender-based violence is a form of discrimination that seriously prevents women from enjoying their rights and freedoms on the basis of equal rights with men.”

Keywords: criminal acts, trials, sexual violence

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan jaman, semakin banyak beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini memiliki dampak terhadap kehidupan sosial, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, memiliki dampak terhadap bentuk kejahatan (Poernomo,1998).

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP. Kejahatan kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru bagi telinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa saja tetapi juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual terjadi bukan hanya di lingkungan perkantoran,lingkungan pelacuran atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga di lingkungan keluarga bahkan hingga lingkungan sekolah (Irfan,2011).

Pengaturan kekerasan terhadap perempuan, khususnya bentuk kekerasan seksual ada dalam Buku II, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang salah satu bentuknya adalah perkosaan yang menjadi topik kajian skripsi ini. Namun sebenarnya ada pula perbuatan lain yang terkait dengan masalah perempuan secara langsung, yang diatur seperti perzinahan, pencabulan, dan pengguguran kandungan. Perkosaan atau *rape* adalah *unlawful sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife through force and against her will* atau hubungan seksual yang melanggar hukum dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang bukan istrinya secara paksa dan bertentangan dengan kehendaknya (Garner, 2004). Percobaan adalah usaha hendak berbuat, untuk masalah percobaan yang menjadi kata pertama dari penelitian ini yang dirumuskan dalam judulnya. KUHP memberikan konsep percobaan Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :a) niat; b) adanya permulaan pelaksanaan; c) tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Ekoputa, 2002). Oleh karena itu perbuatan itu dikatakan sebagai tindak pidana percobaan. Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melaksanakan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu

kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan (Lamintang, 1997).

Setelah memaparkan uraian diatas, maka penulis menarik beberapa persoalan yang perlu dijelaskan yakni; Apakah unsur unsur dari percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP itu sudah terpenuhi dalam putusan no:76/PID/2015/PT.MDN dan putusan no:145/Pid.B/2016/PT.PBR) ; Mengapa hakim dalam putusan no:76/PID/2015/PT.MDN dan no:145/Pid.B/2016/PT.PBR), tentang percobaan kekerasan seksual menjatuhkan pidana kepada terdakwa ; Bagaimanakah tindak pidana percobaan itu dilihat dari perspektif hukum pidana Islam.

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memperjelas mengenai fungsi dari hukum pidana khususnya pasal 53 KUHP Tentang tindak pidana percobaan (pooging)

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini yakni agar dapat memberi pengetahuan mengenai permasalahan perlindungan hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui penerapan pasal 53 KUHP dalam sistem peradilan di Indonesia, sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam percobaan kekerasan seksual. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat melukiskan atau dapat dikatakan menjelajah (Hadikusuma, 1995). Dalam penelitian ini dikarenakan penulis hendak mengkaji bahan hukum yakni Putusan, maka jenis penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normati atau penelitian doktrinal (Marzuki, 2013). Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan untuk mendekati masalah ditinjau dari aspek perundang-undangan (Marzuki, 2013).

Dalam hal ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data literatur atau kepustakaan yaitu peneilitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan sekunder (Fajar dan Achmad, 2010). Metode

analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-datayang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada (Dimyati dan Wardiono, 2004).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak pidana percobaan kekerasan seksual

Dalam penanganan kasus percobaan kekerasan seksual, pihak aparat penegak hukum, polisi menerapkan Pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 35 tentang percobaan dan pasal 285 tentang kekerasan seksual. Dalam hal penanganannya, pihak kepolisian tetap menggunakan prosedur sesuai yang telah diatur dalam KUHAP. Penanganan pertama yang diterapkan polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yakni harus ada laporan dari pihak korban.

Apabila telah dilaksanakan proses hukum oleh kepolisian maka berkas yang telah lengkap akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Menurut Rusli Muhammad “Lembaga Kejaksaan berfungsi sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Justisi atau Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie (R.O). Kejaksaan dikenal dengan sebutan Openbaar Ministrie (O.M), yang bertugas sebagai lembaga penuntut dan pelaksana dari putusan pengadilan pidana dari semua pengadilan” (Fajar dan Achmad, 2010).

Apabila telah melewati proses di kejaksaan Negeri, maka berkas akan dilimpahkan pengadilan Negeri. Disini akan terlihat peran hakim akan sangatlah besar dalam melaksanakan sistem peradilan pidana. Menurut Muladi “Peran yang besar tersebut tidak hanya terkait dengan sistem peradilan pidana itu, tapi yang utama juga adalah usaha dari sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya yaitu usaha yang rasional dari masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan” (Muladi, 1995).

Apabila dilihat dalam Putusan No: 76/PID/2015/PT.MDN dan No: 145/Pid.B/2016/PT.PBR). Unsur yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditentukan bahwa, “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Cakupan syarat percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KUHPidana meliputi sebagai berikut ini: Adanya Niat (*Voornemen*). Oleh banyak kalangan pakar hukum, niat di sini diartikan sama dengan kesengajaan (*opzettelijk*). Tetapi sebaliknya dalam hal kesengajaan yang mana, di sini telah menimbulkan perbedaan pandangan, walaupun pada umumnya para pakar hukum berpendapat luas, ialah terhadap semua bentuk kesengajaan (Hanindyopoetro, dan Artodibyo, 1975).

Adanya Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*) Mengenai semata-mata niat, sejauh apa pun niat, tidaklah mempunyai arti apa-apa dalam hukum pidana. Karena niat itu sendiri adalah suatu sikap batin yang belum ada apaapanya, murni masih di dalam batin seseorang, sikap batin mana boleh sembarang apa yang dimaksudnya, tanpa dimintai pertanggungjawaban, dan tanpa ada akibat hukum apa pun. Barulah mempunyai arti menurut hukum pidana, apabila niat itu telah diwujudkan dalam suatu tingkah laku tertentu, dan tingkah laku tertentu ini oleh Pasal 53 ayat (1) dirumuskan sebagai permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Dalam hal ini telah dimulai pelaksanaan suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai salah satu unsur dari norma pidana. Misalnya: kehendak mencuri atau mengambil barang milik orang lain mulai diwujudkan misalnya, telah memasuki rumah atau pencopet telah memasukkan tangan ke kantong orang yang hendak dicopet (Marpaung, 2008).

Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Sebab dari Kehendaknya Sendiri Pada syarat kedua yang telah dibicarakan, ialah harus telah memulai pelaksanaan (permulaan pelaksanaan). Seperti di atas telah diterangkan bahwa dari sudut proses, permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) adalah mendahului dari perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*), yang sesungguhnya perbuatan

pelaksanaanlah yang dapat menyelesaikan kejahatan, dan bukan permulaan pelaksanaan. Pasal 53 ayat (1) sendiri sesungguhnya membedakan antara permulaan pelaksanaan dengan pelaksanaan. Tentang permulaan pelaksanaan terdapat dalam kalimat “jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan” (*begin van uitvoering*). Sedangkan pelaksanaan atau perbuatan pelaksanaan terdapat dalam kalimat selanjutnya yang berbunyi: “dan tidak selesainya pelaksanaan (*uitvoering*) itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya”. Syarat ketiga tentang dapat dipidananya melakukan percobaan kejahatan ialah pada kalimat yang disebutkan terakhir di atas (Marpaung, 2008).

Tentang syarat untuk dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) yakni: "*Poging tot misdrijf, wanneer het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaar en de uitvoering allen ten gevolge van Iomstandigheden van zijnen wil onafhankelijk, niet is voltooid*". Oleh BPHN diterjemahkan: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Jika melihat penjelasan diatas maka pada Putusan nomor 76/Pid/2015/PT.MDN dan putusan nomor 145/Pid.B/2016/PT.Pbr telah terdapat unsur percobaan sesuai pasal 53 KUHP dimana kedua peristiwa diatas terdapat proses permulaan tindak pidana perkosaan sesuai pasal 285 KUHP tentang perkosaan jo.pasal 53 KUHP tentang percobaan,dimana menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional pasal 53 ayat (1) KUHP dapat di tafsirkan sebagai berikut “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.” Berdasarkan uraian diatas maka putusan nomor 76/PID/2015/PT.MDN dan putusan nomor 145/Pid.B/2016/PT.Pbr telah memenuhi unsur dari pasal 53 KUHP dimana pada pasal 53 ayat (1) KUHP terdapat unsurnya yaitu “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata

disebabkan karena kehendaknya sendiri (Ekoputa, 2002).” Jadi telah jelas bahwa unsur pasal 53 KUHP tentang percobaan telah terpenuhi pada kedua putusan tersebut, dimana pada masing masing putusan dalam kronologisnya telah dicantumkan runtutan peristiwa yang didalamnya sesuai dengan unsur percobaan berdasarkan pasal 53 KUHP.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam nomor 76/Pid/2015/PT.MDN dan dalam putusan nomor 145/Pid.B/2016/PT.Pbr.

Hakim sendiri adalah salah satu aparat penegak hukum yang berwenang mengadili dan menjatuhkan hukuman yang dianggap tepat untuk para pelaku tindak pidana. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Apeldoorn, 2001).

Terdapat beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu: Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Teori Pendekatan Intuisi, penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Teori Pendekatan Keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus di putusnya.

Teori Pendekatan Pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya setiap hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

Teori Ratio Decidendi, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang lebih relevan dengan pokok perkara yang di sengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut: Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

3.3 Tindak pidana percobaan ditinjau dari prespektif hukum pidana islam

Teori tentang jarimah “percobaan” tidak kita dapati di kalangan fuqaha, bahkan istilah “percobaan” dengan pengertian tehnis yuridis juga tidak dikenal oleh mereka. Apa yang dibicarakan oleh mereka ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang belum selesai. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak membicarakan isi teori tentang “percobaan”, sebagaimana yang akan dilihat nanti. Tidak ada nya perhatian para fuqaha secara khusus terhadap jarimah

percobaan disebabkan karena Percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau qishash, melainkan dengan hukuman ta'zir bagaimanapun macamnya jarimah-jarimah itu. Para fuqaha lebih banyak memperhatikan jarimah-jarimah hudud dan qisash, karena unsur dan syarat-syaratnya sudah tetap tanpa mengalami perubahan. Di samping itu, hukumannya juga sudah ditentukan macam dan jenisnya tanpa boleh dikurangi dan ditambah. Akan tetapi untuk jarimah-jarimah ta'zir, hamper seluruhnya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan terutama hukumannya. Di samping itu, hakim diberi wewenang yang luas dalam menjatuhkan hukuman dengan berpedoman kepada batas maksimal dan minimal yang telah ditetapkan oleh penguasa. Ta'zir juga mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu para fuqaha tidak mencurahkan perhatian dan pembicaraan khusus dan tersendiri, karena percobaan melakukan jarimah sudah termasuk jarimah ta'zir. Dengan adanya aturan-aturan yang sudah mencakup dari syara' tentang hukuman untuk jarimah ta'zir maka aturan-aturan yang khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir dijatuhkan atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat. Percobaan yang pengertiannya sebagaimana telah dikemukakan diatas telah mulai melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tetapi tidak selesai, termasuk kepada maksiat yang hukumannya adalah ta'zir. Dengan demikian percobaan sudah termasuk ke dalam kelompok ta'zir sehingga para fuqaha tidak membahasnya secara khusus. Abd al-Qadir Awdah menjelaskan bahwa paling tidak ada tiga fase dalam proses melakukan perbuatan jarimah. Fase-fase tersebut adalah:

Fase pemikiran dan perencanaan (*Marhalah al-Tafkir*), memikirkan dan merencanakan suatu jarimah tidak dianggap maksiat yang dijatuhi hukuman, karena menurut aturan dalam syariat Islam, seseorang tidak dapat dituntut (dipersalahkan) karena lintasan hatinya atau niatan yang tersimpan dalam dirinya, sesuai dengan kata-kata Rasulullah shalallahu 'alaihi wasalam sebagai berikut:

Abu Hurairah radiallahu anhu berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wasalam telah bersabda: "Sesungguhnya Allah mengampuni umatku atas apa yang terlintas dalam hatinya, selama belum dikerjakan atau diucapkan.

....Dari Ibnu Abbas radiallahu anhu, dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wasalam mengenai apa yang difirmankan Allah, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mencatat amal-amal kebaikan, keburukan, dan diantara keduanya. Barangsiapa bermaksud berbuat baik tetapi belum melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat hingga tak terhingga. Barangsiapa bermaksud berbuat buruk (jahat) tetapi ia tidak melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja.

Fase Persiapan (*Marhalah al-Tahdhir*), dalam fase ini ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama ia tidak dikenai sanksi bila perbuatannya itu bukan suatu maksiat. Hukum Islam tidak menghukum seseorang atas tindakannya menyiapkan sarana untuk melakukan tindak pidana, seperti membeli kunci palsu dan sejenisnya, sebab pada mulanya perbuatan itu mubah. Kemungkinan kedua, pelakunya dapat dikenai sanksi, bila perbuatannya merupakan suatu maksiat, seperti membius orang untuk mencuri hartanya atau membeli barang-barang yang haram, semisal ganja, dengan maksud untuk digunakan baik untuk sendiri maupun untuk orang lain ataupun bercumbu dengan wanita lain yang bukan istri ditempat yang sunyi, sebagai persiapan untuk melakukan zina (Dzajuli, 2000).

Fase Pelaksanaan (*Marhalah al-Tanfidz*), fase ini merupakan fase ketiga setelah perencanaan dan persiapan yang matang. Pada fase inilah perbuatan pelaku dapat dianggap sebagai jarimah. Untuk dapat dihukum, tidak menjadi persoalan, apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelaksanaan unsur materiil jarimah atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan itu merupakan maksiat, yaitu yang berupa pelanggaran atas hak masyarakat dan hak perseorangan, dan dimaksudkan pula untuk melaksanakan unsur materiil, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur materiil masih terdapat beberapa langkah lagi. Unsur-unsur jarimah hampir sama dengan unsur-unsur yang ada dengan tindak pidana pada KUHP. Suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur sebagai berikut; Formal. Yaitu adanya *nass* atau ketentuan yang menunjuknya sebagai jarimah, materiil. Yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Moral. Yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut pertanggungjawaban tindak pidana yang hanya

dikenakan kepada orang yang telah baligh, sehat akal, dan *ikhtiyar* (kebebasan berbuat) dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan kepada *mukallaf* (orang yang telah dikenai hukum) dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh (Basyir, 2001).

Ketiga unsur diatas harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan sebagai jarimah. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapt unsur-unsur khusus agar dapat dikenakan hukuman, seperti adanya unsur niat (*voornemen*), permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai sertamerta bukan semata-mata karena kehendak dalam diri si pelaku, bagi jarimah percobaan.

Perbedaan antara unsur umum dan khusus ialah kalau unsur umum satu macamnya pada semua jarimah maka unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Dikalangan *fuqaha* (ahli fiqih) biasanya pembicaraannya tentang kedua unsur umum dan khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu persatunya jarimah (Hanafi, 1967).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pada dasarnya dalam kedua putusan yang telah disampaikan oleh penulis telah memenuhi unsur dari tindak pidana percobaan berdasarkan pasal 53KUHP, dimana pada uraian diatas terdapat unsur percobaan yaitu Mencoba melakukan kejahatan, adanya niat untuk melakukan, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Kedua, dalam penjatuhkan putusan oleh hakim, hakim selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi keadilan. Dimana hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dalam putusan pemidanaan pada putusan di atas, yang mana kedua putusan tersebut berakhir dengan dijatuhkannya pidana penjara kepada terdakwa, Walaupun terkadang masih

dirasa kurang dalam penjatuhan pidannya, sehingga jaksa penuntut mengupayakan banding.

Ketiga, berdasarkan perspektif hukum pidana Islam tindak pidana percobaan ialah apa yang tidak menjadi bahasan para *fuqaha*, tidak ada perhatian khusus mengenai jarimah percobaan ini, karena para *fuqaha* sepakat mengenai pembahasan tentang Percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau qishash, melainkan dengan hukuman ta'zir bagaimanapun macamnya jarimah-jarimah itu. Para *fuqaha* lebih banyak memperhatikan jarimah-jarimah hudud dan qishash, karena unsur dan syarat-syaratnya sudah tetap tanpa mengalami perubahan unsur dan syarat-syaratnya sudah tetap tanpa mengalami perubahan di samping itu, hukumannya juga sudah ditentukan macam dan jenisnya tanpa boleh dikurangi dan ditambah.

4.2 Saran

Pertama, lebih baiknya kedepannya dalam menafsirkan unsur tindak pidana percobaan kekerasan seksual pada putusan pengadilan diharapkan melihat dengan seksama sudahkan dipenuhinya unsur percobaan dalam kasus pada putusan tersebut, sehingga hakim dalam melakukan penjatuhan putusan dapat dengan bijak dan tepat, serta dapat ditegakkanya hukum dengan seadil adilnya.

Kedua, kepada majelis hakim diharapkan dalam menyusun pertimbangan hukum, alangkah baiknya lebih menguraikan secara detail mengenai apa saja hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. agar masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum, dapat memahami pertimbangan tersebut, sehingga dapat mengurugi kesalah fahaman masyarakat awam terhadap hukum.

Ketiga, kepada majelis hakim diharapkan dalam menyusun pertimbangan hukum juga melihat dari segi hukum islam sehingga disamping putusan tersebut membuat jera, juga dapat sebagai pembelajaran dan sarana mendekatkan diri kepada sang pencipta. Agar kedepannya para pelaku tindak pidana dapat bertaubat dan memohon ampun kepada ALLAH S.W.T serta peristiwa yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Van. (2001). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2001). *Ikhtisar Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: UII press.
- Dimiyati, Kudzaifah dan Wardiono, Kelik. (2004). Metode Penelitian Hukum. Surakarta: UMS Press.
- Dzajuli, Ahmad. (2000). *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ekoputa, Mohammad. (2002). *Percobaan (Poging)*. Sumatera utara: Universitas Sumatera Utara
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garner, Bryan A. (2004). *Black Law Dictionary*. Paul Mint: West Publishing
- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hanafi, Ahmad. (1967) *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Marpaung, Leden. (2008). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mubarok, Jaih dan Arif, Enceng. (2004) *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muslich, Ahmad Wardi. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid , Abdul dan Irfan, Muhammad. (2011).”*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokat atas Hak Asasi Perempuan*”. Bandung Refika Aditama,